ABSTRAK

M. Syahiddinnor Purna. Perlindungan Hak Konstitusional Warga atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Banjarmasin. Skripsi, Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Warga, Pemerintah Daerah.

Penelitian ini berangkat dari jaminan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga, termasuk hambatan dan upaya pemerintah daerah.

Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan warga sebagai penerima layanan, sedangkan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup menjadi data pendukung. Data dilengkapi observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Banjarmasin memiliki hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah telah mengupayakan perlindungan melalui pelaksanaan Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, pelayanan pengangkutan, kanal pengaduan, serta program Agen 3R dan bank sampah. Namun, warga masih menyampaikan keluhan mengenai penumpukan sampah, TPS yang meluber, bau, genangan, dan saluran tersumbat. Hambatan meliputi perilaku membuang sampah, keterbatasan kapasitas pengangkutan, cuaca dan banjir rob, serta koordinasi dan tindak lanjut pengaduan. Dengan demikian, perlindungan hak telah diupayakan, tetapi pemenuhannya masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas dan pemerataan layanan, transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas pemerintah daerah.